

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL TUGAS AKHIR TESIS.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat praktis.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Teoritis.....	16
2.1.1 Teori kewenangan.....	16
2.1.2 Perjanjian.....	18
2.1.3 Asas kebebasan berkontrak.....	21
2.1.4 Asas Kepastian Hukum.....	22
2.2 Landasan Konseptual.....	24
2.2.1 Surat Kuasa Mutlak.....	24
2.2.1.1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982.....	25
2.2.1.2 Pasca Instruksi Mendagri dicabut.....	30
2.2.1.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....	30
2.2.1.2.2 Yurisprudensi mengenai kuasa mutlak.....	31
2.2.2 Notaris.....	32
2.2.3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis penelitian.....	41

3.2 Jenis Data.....	42
3.3 Cara Perolehan.....	44
3.4 Jenis Pendekatan.....	45
3.5 Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	48
4.1 Hasil Penelitian Tentang Penggunaan Surat Kuasa Mutlak.....	48
4.2 Analisis Kedudukan Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan.....	59
Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Sistem Jual Beli.....	59
4.2.1 Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	59
4.2.1.1 Surat Kuasa Mutlak.....	59
4.2.1.2 Perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris.....	65
4.2.2 Pengalihan hak atas tanah dengan kuasa mutlak.....	71
4.2.2.1 Tahap pengalihan hak atas tanah dalam sistem jual beli.....	71
4.2.2.2 Pengalihan Hak Atas Tanah Dengan PPJB.....	76
4.2.2.3 Peran surat kuasa mutlak sebagai tindak lanjut PPJB.....	80
4.3 Analisis Karakteristik Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Notaris Pasca Pembatalan Instruksi Mendagri No. 14/1982.....	87
4.3.1 Eksistensi kuasa mutlak pada pengalihan hak atas tanah.....	87
4.3.2 Pengaturan Instruksi Mendagri No. 14/1982.....	90
4.3.2.1 Pengaturan surat kuasa mutlak berdasarkan Instruksi Mendagri No.14/1982.....	90
4.3.2.2 Pengaturan kuasa mutlak pasca pencabutan Instruksi Mendagri No.14/1982.....	92
4.3.3 Akibat Hukum Surat Kuasa Mutlak Pada PPJB yang Dibuat oleh Notaris	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	1
-----------------	---

